

**PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI DESA SENAKIN
KECAMATAN SENGHAH TEMILA
KABUPATEN LANDAK**

Oleh:

DIMAS RAMA*¹
E. 1021131054

Hasan Almutahar² Agus Sikwan²

***Email: dimasrama77@gmail.com**

**1. Mahasiswa Program Studi Pembangunan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak**

**2. Dosen Program Studi Pembangunan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak**

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Senakin Kecamatan Sengha Temila Kabupaten Landak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian yang penulis peroleh dilapangan diketahui bahwa Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga pada hakekatnya diarahkan untuk meningkatkan akses hidup sejahtera bagi individu, keluarga dan kelompok masyarakat terhadap sumber daya untuk melakukan proses produksi dan kesempatan berusaha. Berbagai upaya untuk memotivasi dalam bentuk antara lain bantuan modal dan pengembangan sumber daya manusia. Program pemberdayaan kesejahteraan keluarga merupakan bentuk pengembangan dari model perencanaan pembangunan yang berpihak pada pembangunan manusia khususnya masyarakat miskin di Desa Senakin Kecamatan Sengha Temila Kabupaten Landak. Sebaiknya proses penyuluhan keterampilan tidak sekedar formalitas untuk pelaksanaan program setiap tahunnya karena jelas bahwa penerima program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Desa Senakin membutuhkan penyuluhan keterampilan berusaha sebagai salah satu bekal bagi upaya mereka membangun usahanya, selain itu diperlukan adanya penambahan dari pihak pengelola dan sukarelawan untuk menunjang program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Desa Senakin ini dan Perlunya pengawasan program ini agar dapat diketahui sejauh mana keberhasilan dan kekurangan yang dihadapi.

Kata Kunci :Pemberdayaan, Kesejahteraan, Keluarga, Desa Senakin.

A. PENDAHULUAN

Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga merupakan dana bantuan. Pendekatan dengan pola kelompok dimana mendorong bagaimana masyarakat miskin mampu berdaya secara mandiri dan bersama-sama dengan masyarakat miskin lainnya. Budaya khas masyarakat Indonesia yang mengedepankan kegotong royongan, justru menjadi pilar utama dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

Kehadiran Program PKK sangat penting apabila dipandang dari tujuannya bahwa merupakan salah satu langkah strategis yang ditempuh pemerintah dalam rangka upaya mengatasi kemiskinan, artinya tujuan umum dalam konteks meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah yang lebih difokuskan pada persoalan menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup manusia.

Menghadapi realitas kehidupan yang menunjukkan adanya kesenjangan kesejahteraan mengakibatkan adanya pekerjaan berat kepada para ahli pembangunan termasuk di dalamnya para pembuat kebijakan. Ini dimaksudkan untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul akibat kesenjangan kesejahteraan, perlu dilakukan upaya pembangunan yang terencana.

Upaya pembangunan yang terencana dapat dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang dilakukan. Lebih jauh lagi berarti perencanaan yang tepat sesuai dengan kondisi di suatu wilayah menjadi syarat mutlak dilakukannya usaha pembangunan.

Perempuan sering mendapat *stereotip negative* dari masyarakat dan sering ditempatkan pada posisi subordinat. Hal tersebut dilatar belakangi oleh factor biologis perempuan seperti fisik yang berbeda dengan laki-laki. Pembawaan perempuan atau karakter yang dikonstruksi melalui budaya semenjak anak-anak berpengaruh pada penilaian perempuan ketika dewasa. Perempuan dinomor duakan mulai dari pengambilan keputusan, partisipasi dalam pendidikan serta politik. Hal itu terjadi pada ruang lingkup terkecil sampai ruang publik.

Kondisi ini tidak bisa begitu saja diabaikan, karena akan semakin menimbulkan kesenjangan gender. Perempuan memang diciptakan berbeda secara fisik dengan laki-laki, tapi bukan berarti perempuan disubordinasikan dalam segala hal. Pekerjaan perempuan yang sering dianggap rendah sebenarnya merupakan kesalahan. Tanpa perempuan transfer nilai, keyakinan, norma, budaya,

serta pengetahuan tidak akan berjalan sempurna. Meskipun mendapat penilaian negative atas sikap dan sifat perempuan yang serba menggunakan perasaan, justru menjadikan keunggulan perempuan untuk mencetak generasi yang berkualitas. Melalui kasih sayang seseorang akan mudah menerima satu hal yang baru, Semua seharusnya saling melengkapi.

TINJAUAN PUSTAKA

. Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Suharto (2002:6) mengungkapkan definisi pemberdayaan lebih luas lagi sebagai berikut:

“Pemberdayaan dapat dinyatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau

keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial”

Upaya memberdayakan masyarakat menurut Kartasasmita (2003:159) harus dilakukan melalui tiga langkah yaitu:

1. Menciptakan suasana yang memungkinkan masyarakat berkembang (enabling);
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering);
3. Memberdayakan juga dapat diartikan sebagai melindungi

Menurut Hikmat (2006:3)

konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan. Pada

dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. *Rappaport* dalam Hikmat (2006:4) mengartikan pemberdayaan sebagai pemahaman secara psikologis pengaruh kontrol individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik dan hak-haknya menurut Undang-Undang.

Pemberdayaan dalam konteks masyarakat adalah individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan, Suatu masyarakat yang anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat serta memiliki kebudayaan yang tinggi, untuk dapat bertahan dalam mengembangkan diri mencapai kemajuan (Hikmat,2006:112).

Menurut Kartasmita (2005:156) upaya pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui tiga indikator, yaitu:

1. Perkembangan potensi masyarakat dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat jadi berkembang;
2. Memajukan perekonomian masyarakat dengan memperkuat daya atau potensi yang dimiliki oleh masyarakat, dalam hal ini diperkuat langkah-langkah positif seperti meningkatkan taraf pendidikan dan akses-akses;
3. Memberdayakan masyarakat artinya mengatur dan melindungi, dengan upaya mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat.

Apabila ditinjau konsep pemberdayaan tersebut, dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat, sebagai paradigma pembangunan atau *empowerment* ingin mengubah kondisi ini dengan cara memberi kesempatan pada kelompok orang miskin untuk merencanakan dan kemudian melaksanakan program pembangunan yang juga mereka pilih sendiri. Kelompok orang miskin juga diberi kesempatan untuk mengelola dana

pembangunan baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak lain (Suhendra, 2005:139)

Pada dasarnya, setiap proses pembangunan masyarakat mengandung tiga unsur yang disebut sebagai konsep dasar, yaitu adanya proses perubahan, mobilisasi sumber daya dan pengembangan kapasitas masyarakat. Dalam kata lain bahwa dalam rangka memahami dan menjelaskan fenomena pembangunan masyarakat tersebut dikenal adanya berbagai perspektif yang berangkat dari asumsi dan sudut pandang yang berbeda. Perspektif tertentu memberikan perhatian pada sumber daya alam dan sumber daya manusia, sedangkan perspektif yang lain di samping kedua jenis sumberdaya tersebut juga mencoba menggali, mengembangkan dan mendayagunakan sumber daya sosial yang sering disebut juga dengan modal sosial atau energi sosial.

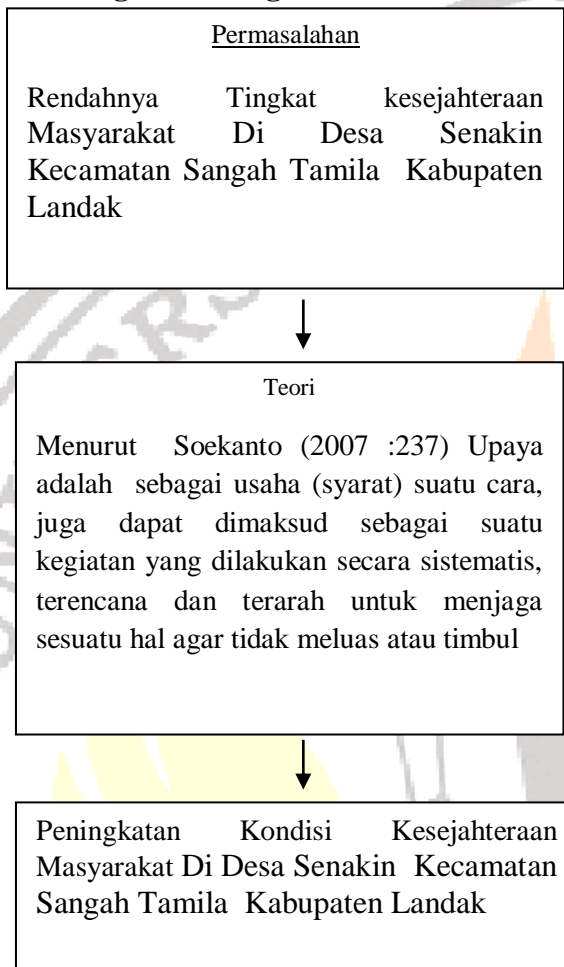
Salah satu cara memahami pengertian suatu konsep adalah melalui definisinya. Dimana disini definisi pengembangan komunitas (*community development*) adalah suatu proses yang merupakan usaha masyarakat sendiri yang diintergrasikan dengan otoritas

pemerintah guna memperbaiki kondisi sosial ekonomi dan kultural komunitas, mengintergrasikan komunitas ke dalam kehidupan nasional dan mendorong kontribusi komunitas yang lebih optimal bagi kemajuan nasional. Penilaian semacam itu muncul karena dalam definisi tersebut terkesan adanya orientasi yang lebih mengarah pada kepentingan masyarakat makro dibandingkan kepentingan komunitas.

Hal itu disebabkan karena berbagai karakteristik yang melekat pada konsep komunitas tersebut memungkinkan dalam kehidupan yang berada pada suatu lokalitas tertentu terkandung adanya kesadaran kolektif dan solidaritas sosial di antara para warganya. Kesadaran kolektif dan solidaritas sosial akan merupakan modal sosial dan energi sosial yang cukup dalam mendasari tindakan bersama bagi peningkatan kehidupan bersama baik sosial, ekonomi maupun kultural. Agar tindakan bersama tersebut lebih bersandar pada prakarsa dan partisipasi masyarakat sendiri dibutuhkan adanya kompetensi masyarakat terhadap proses pembangunan di lingkungan kehidupannya. Kompetensi yang diharapkan meliputi kompetensi pada setiap warga masyarakat secara individual maupun komunitas sebagai

keseluruhan dan kebulatan kehidupan bersama.

Gambar 1
Bagan Kerangka Pikir



C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, dimana menurut Kountur (2005:105) bahwa: “penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan se jelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti”. Metode deskriptif dipilih karena peneliti ingin memperoleh

gambaran dan deskripsi fenomena yang terjadi Untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas penulis menggunakan teknik wawancara dan observasi guna mendukung data lapangan yang telah didapatkan.

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Miles and Huberman (Sugiyono, 2007: 91) mengemukakan bahwa “Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung

secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data diantaranya:

1. Meringkas (*reduksi*), tujuannya agar data yang dianalisis merupakan data-data yang benar-benar berkaitan dengan masalah penelitian.

2. Memaparkan (*display*), Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

3. Penyimpulan (*verifikasi*), data-data yang diperoleh yang telah diringkas dan dipresentasikan kemudian diambil

beberapa kesimpulan yang paling relevan dengan masalah yang diteliti.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, Pemerintah meluncurkan Program Simpanan Keluarga Sejahtera PKK), Secara bertahap pemerintah akan membagikan kepada 15,5 juta keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia, yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang menggantikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebagai penanda keluarga kurang mampu; Kartu HP (*SIM card*) yang berisi uang elektronik yang digunakan untuk mengakses Simpanan Keluarga Sejahtera; Kartu Indonesia Pintar (KIP), sebagai penanda penerima manfaat Program Indonesia Pintar; dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), sebagai penanda penerima manfaat Program Indonesia Sehat.

PKK adalah bantuan tunai bagi keluarga kurang mampu, yang diberikan dalam bentuk rekening simpanan sebagai bagian dari strategi nasional keuangan inklusif. Pemberian bantuan ditujukan untuk mendorong akses terhadap sistem keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan

pendapatan serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Pemberian simpanan merupakan perbaikan dari mekanisme pemberian bantuan tunai dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat yang diberikan sebagai bagian dari paket kompensasi akibat penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak pada tahun 2013.

PemberdayaanPKK kepada rumah tangga sejahtera adalah siklus kegiatan yang dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat di Desa Senakin . Peran pendampingan pihak luar (Fasilitator, Korkab, pemda dan lain-lain), hanyalah sebagai pendamping pembelajaran memulai untuk berusaha, kepedulian, motivasi, keputusan dan ikhtiar dari masyarakat berbasis pada nilai-nilai luhur dan kebutuhan masyarakat. Pada tahap pemberdayaanPKK , para pendamping berkewajiban melakukan proses pembelajaran masyarakat agar mereka mampu melakukan tahapan kegiatan PKK .

Upaya merealisasikan program tersebut adalah dengan bekerjasama dengan instansi yang berkompeten dalam penanganan PKK kepada Rumah Tangga Sasaran dengan melakukan berbagai kegiatan, seperti melakukan sosialisasi dan

transparansi informasi; melakukan pendataan dan/atau penargetan terhadap rumah tangga sejahtera, melakukan pencatatan frekuensi pendistribusian, melakukan pengecekan mengenai jumlah dana yang diterima oleh penerima manfaat, melakukan pengawasan terhadap sistem pembayaran; serta melakukan evaluasi dan monitoring secara bertahap dan kesinambungan.

PemberdayaanPKK diawali dengan kegiatan keorganisasian dengan melakukan penyusunan perencanaan pembangunan desa dengan melibatkan pihak-pihak terkait desa yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan desa. Termasuk dalam kegiatan awal tahun adalah persiapan pemberdayaanPKK dengan menyusun dan menginventarisasi dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagai program pembangunan yang difokuskan kepada upaya percepatan pembangunan di desa yang kondisi sosial, ekonomi, keuangan daerah, aksesibilitas serta ketersediaan infrastruktur yang masih terbatas.

Program PKK merupakan program yang langsung dengan masyarakat, serta melibatkan berbagai pihak baik pemerintah

pusat maupun pemerintah daerah. Demikian pula aparat desa, lembaga musyawarah desa, LSM, serta tokoh masyarakat. Oleh karena itu pemerintah pusat yang di wakili oleh tim koordinasi PKK pusat dan pemerintah daerah yang di wakili oleh tim koordinasi PKK daerah baik propinsi maupun kabupaten\kota, perlu berkerja sama dan bersegi dalam melaksanakan PKK .

PKK merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin yang sekaligus untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran di samping itu juga di maksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasar masyarakat. PKK merupakan salah upaya pemerintah untuk membantu penyediaan sebagai kebutuhan pangan pokok keluarga miskin. Melalui pemberdayaanPKK bersama program bantuan penanggulangan kemiskinan lainnya di harapkan dapat memberikan manfaat yang nyata dalam

peningkatan kesejahteraan sosial rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Tim pelaksana program, menyatakan bahwa keorganisasian PKK sebagaimana diatur melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Pemberdayaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat, bahwa PKK merupakan suatu program yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang mengarah pada kemitraan yang berbasis pada kekuatan masyarakat. Oleh karena itu, usaha kecil dan menengah merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dan pembangunan ekonomi. Mereka juga menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan sektor usaha lainnya, dan mereka juga cukup terdiversifikasi dan memberikan kontribusi penting dalam ekspor dan perdagangan.

Berdasarkan pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa pemberdayaan PKK di Desa Senakin diawali dengan kegiatan keorganisasian dengan melakukan

penyusunan perencanaan pemberdayaan masyarakat desa yang melibatkan pihak-pihak terkait aparat desa. Termasuk dalam kegiatan awal tahun adalah persiapan Pemberdayaan program dengan menyusun dan menginventarisasi dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam kegiatan PKK untuk Rumah Tangga Sasaran yang difokuskan kepada upaya pemberdayaan masyarakat di desa yang kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih rendah.

Pelaksana PKK untuk Rumah Tangga Sasaran yang kurang mampu mendorong terwujudnya tujuan program PKK untuk Rumah Tangga Sasaran, karena upaya yang dilakukan oleh pihak berwenang agar pendistribusian PKK belum sesuai dengan ketentuan, sehingga belum sepenuhnya terlaksana, terutama dalam mengatur agar PKK untuk Rumah Tangga Sasaran dilaksanakan secara transparan, dan adanya sikap keberpihakan kepada Rumah Tangga Sasaran yang menerima bantuan PKK.

PKK di Desa Senakin merupakan suatu upaya pemerintah untuk mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sosial ekonomi daerah-

daerah tertinggal dan khusus. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan memfasilitasi pembangunan partisipatif, pemberdayaan masyarakat dan lembaga-lembaga masyarakat terhadap keadilan dan meningkatkan kemudahan hidup melalui penyediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi.

Berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Senakin, diperoleh keterangan bahwa pemberdayaan PKK di Desa Senakin mengacu kepada pedoman umum PKK sebagai bahan acuan pemberdayaan Program PKK. Berdasarkan pedoman umum ini, Tim Koordinasi Program PKK Provinsi menyusun pedoman pemberdayaan sebagai acuan dalam pemberdayaan PKK untuk Rumah Tangga Sasaran di Provinsi. Selanjutnya Tim Koordinasi PKK Kabupaten menyusun petunjuk teknis Program PKK yang sesuai dengan kondisi objektif daerah masing-masing sebagai acuan pemberdayaan program.

Dalam rangka pemberdayaan PKK untuk Rumah Tangga Sasaran pada tahun 2019

diatur melalui organisasi pelaksana PKK untuk Rumah Tangga Sasaran. Untuk mengefektifkan pemberdayaan program dan pertanggung jawabannya, maka dibentuk Tim Koordinasi PKK untuk Rumah Tangga Sasaran di Pusat sampai Kecamatan dan pelaksana RSKS untuk Rumah Tangga Sasaran Desa.

Penanggungjawab PKK untuk Rumah Tangga Sasaran adalah Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Penanggungjawab pemberdayaan PKK untuk Rumah Tangga Sasaran di Provinsi adalah Gubernur, di Kabupaten adalah Bupati, di Kecamatan adalah Camat dan di Desa adalah Kepala Desa. Tim Koordinasi Kecamatan terdiri dari penanggung jawab, Ketua, Sekretaris, dan beberapa bidang antara lain Bidang perencanaan, Bidang Sosialisasi, Bidang pelaksana, Bidang Monitoring dan Evaluasi dan Pengaduan masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan Camat.

Keanggotaan Tim Koordinasi PKK untuk Rumah Tangga Sasaran Kecamatan Putussibau Selatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di Tingkat Kecamatan antara lain

Sekretaris Kecamatan, Seksi kesejahteraan Sosial, Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) dan Satuan Kerja (Setker) PKK untuk Rumah Tangga Sasaran.

Berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Senakin, bahwa pemberdayaan PKK untuk Rumah Tangga Sasaran di Desa Senakin, yaitu bertanggungjawab adalah Kepala Desa atas pemberdayaan pemberdayaan PKK untuk Rumah Tangga Sasaran di Desa Senakin, memilih dan menetapkan salah satu dari 3 (tiga) alternatif pelaksana distribusi PKK untuk Rumah Tangga Sasaran, yaitu:

1. Kelompok Kerja (Pojka)
2. Warung Desa (Wardes)
3. Kelompok Masyarakat (Pokmas).

Pembentukan Pokmas dan Wardes diatur dalam pedoman khusus yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Pedoman Umum PKK, antara lain:

- a. Kedudukan, yaitu pelaksana distribusi PKK untuk Rumah Tangga Sasaran berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa

- b. Tugas pelaksana distribusi PKK untuk Rumah Tangga Sasaran yaitu memeriksa, menyerahkan, menerima uang pembayaran serta menyelesaikan administrasi.

- c. Fungsi pelaksana distribusi PKK untuk Rumah Tangga Sasaran adalah 1) pemeriksa dan penerima atau penolakan PKK untuk Rumah Tangga Sasaran dari Satker atau tempat penyerahan PKK untuk Rumah Tangga Sasaran; 2) Pendistribusian dan penyerahan PKK untuk Rumah Tangga Sasaran 4) Penyelesaian administrasi distribusi PKK untuk Rumah Tangga Sasaran yaitu Berita Acara Serah Terima (BAST) dan daftar Rumah Tangga Sasaran penerima PKK.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari kelompok sasaran yaitu Rumah Tangga Sasaran penerima PKK Desa Senakin, menyatakan bahwa dalam pemberdayaan PKK yang ditujukan kepada Rumah tangga Sasaran, maka Kepala Desa sebagai penanggung jawab di tingkat desa dan bertanggung jawab atas pemberdayaan PKK, penyelesaian pembayaran dan administrasi PKK di wilayahnya. Untuk penyelenggaraan program PKK

diwilayahnya, Kepala Desa telah membentuk Tim koordinasi PKK sebagai berikut:

- a. Kedudukan tim koordinasi PKK Desa Senakin adalah pelaksana program PKK di desa, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- b. Tugas tim koordinasi PKK Desa Senakin mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi pemberdayaanPKK serta melaporkan hasilnya kepada tim koordinasi PKK Kecamatan.
- c. Fungsi dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi PKK Desa Senakin mempunyai fungsi: Perencanaan PKK di desa, Fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif, dan penyebarluasan informasi PKK di desa, Pembinaan terhadap pemberdayaantugas dan fungsi Pelaksana PKK Desa, Pemantauan dan evaluasi pemberdayaanprogram PKK di desa.

Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi PKK di Desa Senakin , Tim Koordinasi PKK desa

terdiri dari penanggung jawab yaitu: Kepala Desa, yaitu ketua, sekretaris desa, Kasi Kesejahteraan Masyarakat, dan anggota terdiri dari aparat desa, anggota Satker PKK dan pihak terkait yang dipandang perlu.

Interpretasi Program SimpananKeluarga Sejahtera (PKK), yaitu menafsirkan agar PKK menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Interpretasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sejauhmana pemahaman implementor terhadap kebijakan, pemahaman terhadap program dan tujuan kebijakan. Interpretasi terhadap PKK yaitu bagaimana fungsi/penggunaan dan pendistribusian PKK tersebut bagi rumah tangga sasaran dapat diterima dan dilaksanakan.

PKK merupakan program yang diharapkan dapat menstimulasi percepatan pembangunan sosial ekonomi masyarakat Desa Senakin sebagai daerah perdesaan yang perlu adanya pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Agar PKK dapat mencapai tujuan, maka diperlukan prinsip-prinsip pengelolaan program yang meliputi:

desentralisasi, artinya memberikan kewenangan dan tanggungjawab kepada pengelola PKK kepada pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Pemberdayaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat. PKK ini dilaksanakan secara partisipatif, artinya mendorong keterlibatan masyarakat desa secara luas dan aktif, prioritas, artinya pengambilan keputusan mengutamakan kebutuhan masyarakat yang kurang mampu, terbuka artinya, informasi pengelolaan kegiatan dapat diakses dengan diketahui oleh masyarakat luas.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kelompok Sasaran yaitu Rumah Tangga Sasaran yang menerima bantuan PKK, bahwa PKK telah diketahui oleh Rumah Tangga Sasaran, melalui kegiatan sosialisasi oleh Tim Pelaksana PKK, namun tidak semua informasi yang disampaikan dapat dipahami secara keseluruhan, terutama mengenai sistem penyaluran kartu keluarga sejahtera.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diasumsikan bahwa pelaksana sosialisasi PKK untuk Rumah Tangga Sasaran belum sepenuhnya dilaksanakan, sehingga masih banyak masyarakat terutama Rumah Tangga Sasaran yang belum memahami mekanisme PKK, bahkan ada yang belum tahu sama sekali adanya program tersebut.

PKK untuk Rumah Tangga Sasaran merupakan program yang berupaya melakukan penganggulangan kemiskinan secara terpadu dan stimulan oleh pemerintah bersama masyarakat, melalui tiga kluter, yaitu program bantuan dan perlindungan sosial berbasis keluarga, dimana program PKK untuk Rumah Tangga Sasaran termasuk di dalamnya. Agar PKK untuk Rumah Tangga Sasaran dapat mencapai tujuan, maka diperlukan prinsip-prinsip pengelolaan informasi program yang meliputi: desentralisasi, artinya memberikan kewenangan dan tanggungjawab kepada pengelola PKK untuk menginformasikan program kepada Rumah Tangga Sasaran, partisipatif, artinya mendorong keterlibatan masyarakat secara luas dan aktif, prioritas, artinya pengambilan keputusan

mengutamakan kebutuhan masyarakat miskin, terbuka artinya, informasi pengelolaan kegiatan dapat diakses dengan diketahui oleh masyarakat luas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tim Pelaksana Program, diperoleh informasi bahwa aktifitas sosialisasi sudah dilakukan di Desa Senakin dilaksanakan sesuai dengan mekanisme tepat sasaran, yaitu tepat sasaran penerima manfaat, tepat jumlah, tepat waktu, tepat administrasi.

Sosialisasi PKK untuk Rumah Tangga Sasaran di Desa Senakin Kecamatan Putussibau Selatan belum sepenuhnya terealisasikan sesuai dengan tujuan program yakni berjalan dengan efektif dan efisien, yang telah dilaksanakan oleh pelaku sesuai sasaran program yakni pemerintah daerah umumnya dan masyarakat pada khususnya dapat menikmati manfaat, hasil serta tujuan dari program tersebut. Hal tersebut tidak terlepas dari peran Tim Koordinator desa dalam hal ini Kepala Desa selaku ketua tim, Satuan Kerja Desa, Fasilitator Desa, serta pelaku langsung dari masyarakat selaku penerima PKK.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kelompok Sasaran yaitu Rumah Tangga Sasaran yang menerima bantuan PKK, diperoleh keterangan bahwa masyarakat pada umumnya menyatakan belum mengetahui sebelumnya tentang informasi mengenai PKK untuk Rumah Tangga Sasaran, karena sebelumnya Tim Pelaksana Program sebagai pelaksana PKK untuk Rumah Tangga Sasaran belum melakukan sosialisasi secara rutin kepada seluruh masyarakat miskin yang ada di Desa Senakin Kecamatan Putussibau Selatan. Sedangkan ada sebagian masyarakat menyatakan sudah mengetahui informasi sebelumnya mengenai PKK untuk Rumah Tangga Sasaran, yang bersumber dari pihak desa dan kecamatan, media cetak dan elektronik. Tetapi informasi yang diterima belum secara keseluruhan dapat dipahami, artinya masyarakat hanya mendengar ada bantuan berupa Simpanan Keluarga Sejahtera untuk masyarakat miskin yang diberikan oleh pemerintah. Akan tetapi informasi mengenai peraturan-peraturan yang mengatur masalah PKK bagaimana prosedur PKK untuk Rumah Tangga Sasaran sampai kepada penerima manfaat PKK untuk

Rumah Tangga Sasaran tersebut belum pernah diketahui.

Berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Senakin menyatakan bahwa pemberdayaan sosialisasi PKK untuk Rumah Tangga Sasaran di Desa Senakin sudah dilaksanakan kurang lebih 1 kali pertemuan dalam sebulan dengan tujuan untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada seluruh pemangku kepentingan PKK untuk Rumah Tangga Sasaran. Melalui sosialisasi PKK untuk Rumah Tangga Sasaran, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemberdayaan PKK untuk Rumah Tangga Sasaran sehingga dapat mencapai target. Sosialisasi PKK untuk Rumah Tangga Sasaran dilakukan secara berjenjang dari Tim Pelaksana PKK untuk Rumah Tangga Sasaran Kabupaten dan Kecamatan. Metode sosialisasi dilakukan disamping bertatap muka juga dilakukan melalui media massa, media cetak, elektronik dan media lainnya.

Berdasarkan pernyataan dari Kelompok Sasaran yaitu Rumah Tangga Sasaran yang menerima bantuan PKK di Desa Senakin, dapat diperoleh keterangan bahwa masyarakat pernah menerima PKK untuk Rumah Tangga Sasaran dari

pemerintah melalui pemerintah desa sebagai bentuk dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin yang sekaligus untuk mengurangi beban Rumah Tangga Sasaran. Namun prekuensi penerimaan bantuan tersebut berdasarkan berpariasi, yaitu ada yang selama program ini bergulir masyarakat menerima PKK untuk Rumah Tangga Sasaran, ada juga yang menyatakan tidak mendapatkan haknya.

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa bahwa kemampuan Tim Pelaksana Program untuk Rumah Tangga Sasaran dalam mensosialisasikan PKK di Desa Senakin yaitu keterbatasan pengetahuan, dalam menginformasikan materi PKK untuk Rumah Tangga Sasaran dan mengenai mekanisme program, koordinasi para pelaku, dan rendahnya SDM dalam pemahaman PKK untuk Rumah Tangga Sasaran.

Pemberdayaan PKK untuk Rumah Tangga Sasaran diawali kegiatan penyusunan dan perencanaan pembangunan kemandirian masyarakat dengan melibatkan pihak-pihak terkait di desa, yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan

pembangunan daerah termasuk di dalamnya adalah persiapan pemberdayaan PKK untuk Rumah Tangga Sasaran, menyusun dan menginventarisasi dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam ruang lingkup kegiatan bidang peningkatan kapasitas, yang meliputi:

- a. Peningkatan kapasitas dalam keterampilan fasilitas perencanaan partisipatif, masalah dan kebutuhan masyarakat.
- b. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan yang mampu meningkatkan layanan sosial dasar.
- c. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat untuk mengelola program pembangunan secara partisipatif dan pemantauan terhadap pemberdayaan kegiatan pembangunan.

Kegiatan sosialisasi PKK untuk Rumah Tangga Sasaran di Desa Senakin Kecamatan Putussibau Selatan, di samping ada yang dapat dipahami oleh masyarakat juga ada yang tidak dapat dipahami. Tujuannya adalah untuk menghindari salah penggunaan dalam pendistribusian Kartu keluarga Sejahtera pada keluarga miskin dan mengutamakan

prioritas kebutuhan masyarakat yang miskin, maka PKK untuk Rumah Tangga Sasaran menetapkan kebijakan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui bantuan secara langsung.

Kepala Desa, yaitu secara umum peran utama dalam memberikan dukungan dan jaminan agar pemberdayaan PKK di wilayah kerjanya agar dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tujuan yang diharapkan melalui PKK dapat tercapai dengan baik. Di samping itu Kepala Desa dapat mengerahkan perangkat desa sesuai dengan fungsi masing-masing. Secara rinci tugas dan tanggung jawab Kepala Desa dalam pemberdayaan PKK adalah sebagai berikut:

- a. Membantu sosialisasi tingkat desa dan rebus kesiapan masyarakat yang menyatakan kesiapan seluruh masyarakat untuk mendukung dan melaksanakan PKK
- b. Memfasilitasi terselenggaranya pertemuan Kepala Dusun, pengurus RT/RW dan masyarakat dengan Tim Fasilitator, dan relawan masyarakat dalam upaya

penyebarluasan informasi dan pemberdayaanPKK

c. Memfasilitasi

pemberdayaanpemetaan swadaya (*Community Self Survey*) dalam rangka pemetaan kemiskinan dan potensi sumberdaya masyarakat yang dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat;

d. Memfasilitasi proses pembentukan koordinator desa. (Bentuk-bentuk dukungan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat, serta ketentuan PKK);

e. Memfasilitasi dan mendukung penyusunan program Jangka Menengah Penanggulangan Kemiskinan dan rencana tahunannya oleh masyarakat yang diorganisasikan oleh lembaga kepemimpinan masyarakat setempat.

f. Memberi laporan bulanan kegiatan Program PKK diwilayahnya kepada Camat.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

a. KegiatanPerberdayaan PKK biasanya diarahkan kepada perannya dalam mengembangkan partisipasi perempuan dalam

pembangunan Desa melalui program-program yang dijalankan. Sehingga membawa kaum perempuan sebagai agen yang sangat penting bagi kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Adapun 10 program yang dimiliki oleh PKK, yaitu penghayatan dan pengalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat.

b. Program pokok PKK adalah program dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk terwujudnya kesejahteraan keluarga. Tim Penggerak PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang demi terlaksananya program PKK.

c. Pemanfaatan Program PKK pada hakekatnya diarahkan untuk meningkatkan akses hidup sejahtera bagi individu, keluarga dan kelompok masyarakat

terhadap sumber daya untuk melakukan proses produksi dan kesempatan berusaha. Berbagai upaya untuk memotivasi dalam bentuk antara lain bantuan modal dan pengembangan sumber daya manusia.

2. Saran

- a. Diharapkan kepada Tim Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ke depannya lebih gencar dalam mensosialisasikan program ini dan dapat merekrut kader-kader yang baru.
- b. Diharapkan kepada Tim Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga lebih sering mengadakan pelatihan-pelatihan dan sharing sesama kader untuk kegiatan pokja.
- c. Sebaiknya proses penyuluhan keterampilan tidak sekedar formalitas untuk pelaksanaan program setiap tahunnya karena jelas bahwa penerima bantuan PKK membutuhkan penyuluhan keterampilan berusaha sebagai salah satu bekal bagi upaya mereka membangun kesejahteraan kehidupan keluarga.

REFERENSI

- Alwi, Hasan dkk. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lubis dan Martani. 1987. *Teori Organisasi*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Nogi Tangkilisan, Hassel. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo.
- Siagian, Sondang P. 1978. *Manajemen Modern*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Steers, Richard M. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga..
- Sulistiyani, A.T. 2004 *Kemitraan dan model-model Pemberdayaan*. Jogjakarta: Gavamedia
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. 2011. *Pedoman Pelaksanaan Lembaga Keuangan Mikro Kelompok Usaha Bersama Sejahtera*. Jakarta: Kemensos.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. 2011. *Pedoman Kelompok Usaha Bersama*. Jakarta: Kemensos